

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

**KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
*TAHUN 2011***

KATA PENGANTAR

Terciptanya Good Governance adalah idaman semua masyarakat dunia dimana Pemerintah yang melaksanakan tugasnya mempunyai tekad dan semangat untuk mengimplementasikan aspirasi masyarakat atau sering disebut pemerintah yang berpihak pada rakyat. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga akan terwujud Pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada Era Pemerintahan sekarang ini sangat jelas sekali komitmen dari Pemerintah untuk memerangi KKN dengan Penegakan Hukum yang jelas bagi penyelenggara Negara yang terlibat KKN, hal ini merupakan perwujudan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Semua penyelenggara Negara dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga/Badan lain yang dibiayai dari anggaran Negara diwajibkan membuat pelaporan Pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan, sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas Kecamatan Sambeng yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas pemerintahan diharuskan melaporkan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sambeng pada tahun 2011 disusun berdasarkan atas Rencana Setrategik yang telah ditetapkan didalam Visi-nya "**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN MASYARAKAT YANG OPTIMAL**" yang dijabarkan lagi dalam Misi Kecamatan Sambeng, yaitu :

1. **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Governance;**
2. **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.**

Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diharapkan terwujud Pemerintahan yang Bersih dan akuntabel serta terselenggaranya Good Governance dan meningkatnya pelayanan masyarakat secara optimal. Semoga LAKIP Kecamatan Sambeng Tahun 2011 ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan penyempurnaan program-program dimasa yang akan datang.

Sambeng, 25 Januari 2012



CAMAT SAMBENG

SUDJITO, SE

Pembina

NIP. 196001191993031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana arah kebijakan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 yang ditekankan pada Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing, hal ini salah satu bentuk kegiatannya sebagaimana telah dituangkan dalam visi Kecamatan Sambeng yakni “**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN MASYARAKAT YANG OPTIMAL**” Langkah nyata yang dilaksanakan yaitu menyatukan gerak – langkah dan tindakan bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya serta memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada masyarakat.

Wujud nyata aparat sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan masyarakat yang optimal terus digalakkan sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan langsung pada masyarakat ditingkat bawah. Namun didalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih dijumpai kendala yakni di bidang penyelenggaraan pemerintahan terkendala pelaksanaan koordinasi baik yang sudah terjadwal maupun bersifat exsistil belum dapat berjalan secara optimal, karena keterbatasan kemampuan personil serta kurang didukung tingkat pendidikan Aparatur Desa yang sebagian besar masih rendah. Dibidang pelayanan, masih adanya beberapa aparat yang belum memahami secara benar arti melayani masyarakat mereka masih terbawa paradigma lama bahwa mereka adalah penguasa. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah diupayakan langkah nyata secara bertahap berupa pembinaan dan mengikuti pelatihan bagi Aparatur Kecamatan maupun Perangkat dalam setiap kesempatan, melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal di tingkat Kecamatan, bahkan ada beberapa aparat tingkat Kecamatan yang ditugaskan secara khusus untuk membina Perangkat Kecamatan maupun di Desa. Sehingga harapan kedepan semua Instansi Pemerintah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Upaya ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi program kerja tahunan, dimana dimasa yang akan datang tantangan akan semakin berat sehingga perlu diimbangi dengan pembekalan diri dan kemauan untuk berubah sebagai Abdi Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
E. RENCANA STRATEJIK	6
1. VISI	6
5. MISI	6
6. TUJUAN	7
7. SASARAN	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011.....	7
1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	
2. PROGRAM.	
3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	
C. PERJANJIAN KINERJA	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. PENGUKURAN KINERJA	13
B. EVALUASI KINERJA	14
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN :	
- RENCANA STRATEGIS (RS).	
- RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).	
- PENETAPAN KINERJA	
- PENGUKURAN KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG :

Kecamatan Sambeng merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, bahwa Kecamatan sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan pasal 126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, Hal ini mengandung pengertian bahwa Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokoknya seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

b. TUGAS DAN FUNGSI :

Ditinjau dari tugas dan fungsi Kecamatan , terdapat penegasan bahwa tugas pelayanan imenjadi prioritas dengan penekanan yakni upaya mendahulukan kepentingan umum dan memberikan kepuasan kepada public. Dalam kondisi ideal, terdapat 4 (empat) fungsi pokok Kecamatan yaitu fungsi Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan

fungsi pemberdayaan masyarakat. Kompleksitas fungsi tersebut tentunya harus didukung oleh kewenangan, pendanaan, infrastruktur dan kapasitas sumberdaya manusia.

Adapun **Tugas Camat** yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Disamping itu Camat melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek :

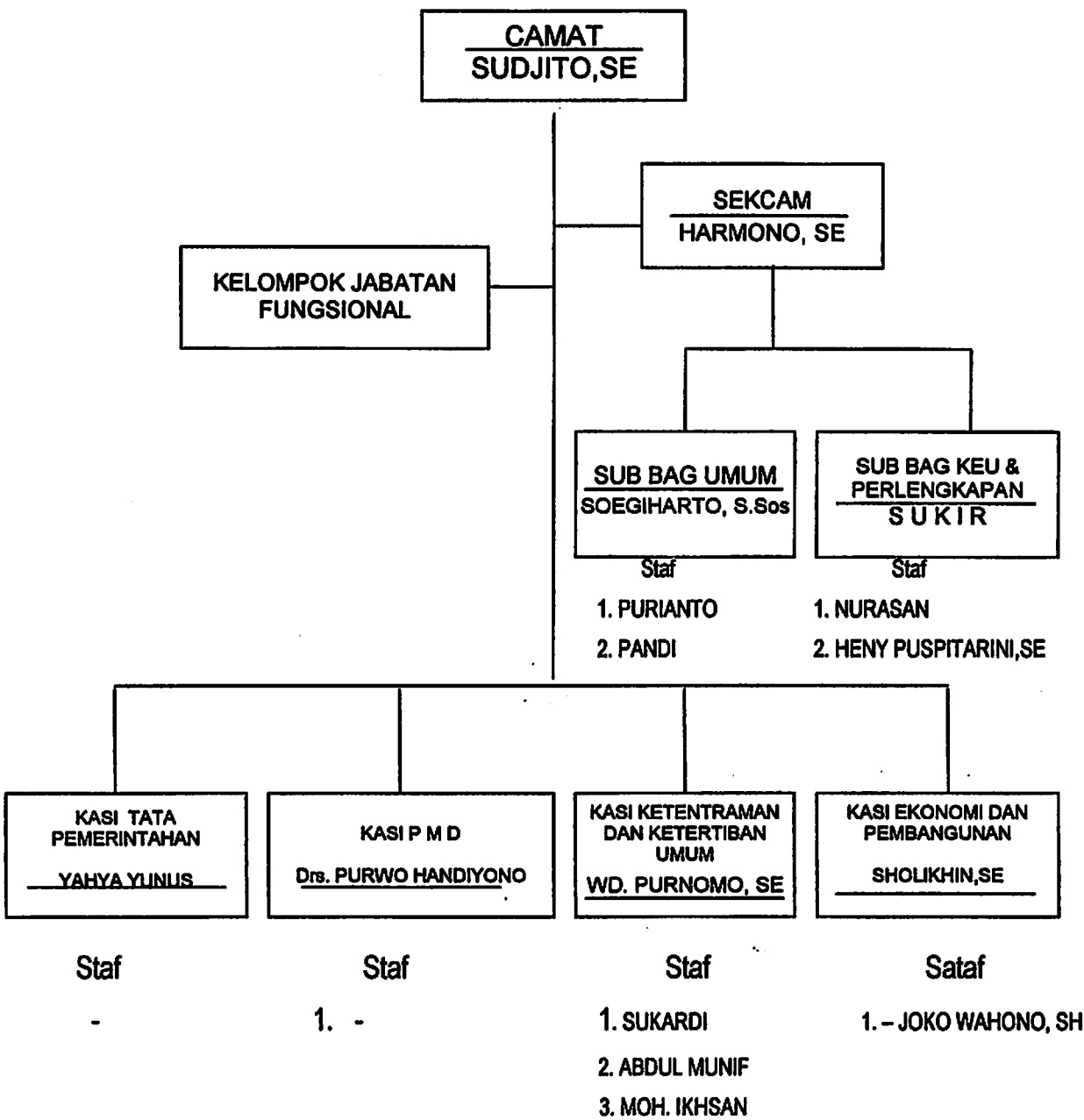
- Perijinan.
- Rekomendasi.
- Koordinasi.
- Pembinaan.
- Pengawasan.
- Fasilitas.
- Penetapan.
- Penyelenggaraan, dan
- Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sedangkan Kecamatan memiliki **fungsi** :

1. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu ;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban ;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ;

5. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun *Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambeng* sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 08 Tahun 2008 berikut Pejabatnya adalah sebagai berikut :



c. **ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Sambeng memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mensukseskan program pembangunan daerah di wilayahnya sebagai bagian integral dalam mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Lamongan, mengingat pada Kantor Kecamatan Sambeng melekat kewenangan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi, fungsi Pembinaan dan fungsi Pelayanan sebagai kewenangan atributif disamping kewenangan delegatif yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatan, tentunya perlu mengetahui factor-faktor kekuatan Sumber Daya maupun potensinya. Disamping itu perlu kita pahami factor-faktor penghambat kekuatan Sumber Daya. Selanjutnya untuk mengenal factor tersebut maupun mendayagunakan potensi yang ada diperlukan suatu analisis. Analisis SWOT dipandang sebagai cara yang sistematis untuk mengidentifikasi factor-faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) intern organisasi serta peluang (opportunities) dan ancaman (Threats) sebagai factor eksternal organisasi.

1. Strengths (Kekuatan).

a. SDM Aparatur Kecamatan dan Desa.

Loyalitas dan dedikasi yang tinggi aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas merupakan modal utama. Hal ini ditunjang pula peningkatan koordinasi yang mantap antar Instansi Sektoral yang ada di wilayah Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana.

Sarana prasarana Kantor Kecamatan yang cukup memadai dan prasarana perhubungan dan komunikasi antar Desa yang relative lancar, merupakan penunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c. Budaya gotong-royong.

Budaya gotong-royong yang masih tumbuh dan terpelihara di masyarakat merupakan potensi yang bernilai tinggi untuk membina kegiatan social kemasyarakatan.

2. Weakness (Kelemahan).

a. Terbatasnya Sumber Dana.

Belum optimalnya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terbatasnya subsidi dari Pemerintah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Kecamatan.

b. Rendahnya Kualitas SDM

Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan pada kenyataannya masih dihadapkan pada kualitas yang masih rendah. Tingkat kemiskinan yang relative masih tinggi sebagai salah satu indikator kualitas SDM, berdampak pula pada proses percepatan pembangunan.

3. Opportunities (Peluang).

a. Diberlakukannya Otonomi Daerah;

Dengan berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk melaksanakan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan diberi peluang yang lebih luas untuk mendorong otonomi pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

b. Potensi Wilayah;

Kecamatan Sambeng mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, dengan lahan pertanian tadah hujan dan didukung beternak sapi, kambing, itik dan ayam yang memiliki nilai jual maupun nilai ekonomi cukup baik. Selain hal tersebut akses antar desa maupun Kecamatan relative cukup lancar serta wilayah Kecamatan Sambeng hamper 58 % dikelilingi Hutan Jati Negara.

4. Threats (Ancaman).

a. Kecamatan Sambeng utamanya bagian Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang yang mana arus transformasi dan perkembangan kehidupan masyarakat di kedua Kabupaten tersebut berdampak pula pada pola hidup dan pola pikir masyarakat Kecamatan Sambeng. Kesenjangan pembangunan di dua Kabupaten Mojokerto dan Jombang dengan Kabupaten Lamongan dapat menjadi pemicu kecemburuan social. Oleh karena itu kondisi ini harus dikelola dengan baik, agar kondisi masyarakat tetap kondusif.

b. Kondisi Ekonomi secara Makro.

Kondisi ekonomi sebagai akibat krisis global yang berkepanjangan, berdampak pula pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan di wilayah.

c. Kerawanan Sosial.

Terjadinya degradasi moral terhadap nilai-nilai agama, adat dan budaya, sempitnya lapangan kerja berkorelasi pada peningkatan angka pengangguran, gangguan Kamtibmas, kriminalitas dan kenakalan remaja. Hal ini harus diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kerawanan social.

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

a. RENCANA STRATEGIK

1. Visi.

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN MASYARAKAT YANG OPTIMAL”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sambeng secara terpadu.

Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yakni :

- 1). ***Terwujudnya***, terkandung upaya dan peran pemerintah Kecamatan Sambeng dalam mewujudkan Pemerintahan Kecamatan Sambeng yang bersih dan akuntabel serta pelayanan masyarakat yang optimal.
- 2). ***Pemerintahan yang bersih***, adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menerapkan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3). ***Akuntabel***, adalah mampu serta ahli dalam bidangnya serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrative dalam memberi pelayanan pada masyarakat secara optimal.
- 4). ***Pelayanan Masyarakat***, adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan, mengurus secara profesional apa yang diperlukan masyarakat.
- 5). ***Optimal***, mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus dikerjakan secara sungguh-sungguh serta sepenuhnya, berpedoman pada aturan main dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat

2. Misi.

Adalah umusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Adapun *Misi* SKPD Kecamatan Sambeng adalah sebagai berikut :

- 1). ***Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta terselenggaranya Good Governance.***
- 2). ***Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.***

3. Tujuan.

Bahwa untuk mewujudkan Misi SKPD Kecamatan Sambeng, perlu ditetapkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Pemerintah Kecamatan Sambeng secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran Misi serta program yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Misi “ ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Governance***”, ditetapkan 1 (satu) Tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

- 1). ***Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Governance.***

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Sasaran.

Sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Kecamatan Sambeng selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Untuk mencapai tujuan ***“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Governance”***, ditetapkan **sasaran** sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, dengan indicator :
 - a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RENSTRA yang telah ditetapkan.
 - b. Penjabaran program RENSTRA ke dalam RKP.
 - c. Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu.
 - d. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 2). Meningkatnya penanganan pertanahan, dengan indicator :
 - a. Luas lahan bersertipikat;
 - b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara;
- 3). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, dengan indicator :
 - a. Sistem Informasi Manajemen SKPD Kecamatan.
 - b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
- 4). Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara baik :
 - a. Dokumen pengelolaan administrasi Kepegawaian secara tertib.
 - b. Tercapainya tertib Pelaporan Administrasi Kepegawaian.
- 5). Meningkatnya Waskat dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indicator :
 - a. Penurunan kasus pelanggaran Hukum oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa.
 - b. Evaluasi tindaklanjut pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kasubag.
 - c. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu.
- 6). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, dengan indicator:
 - a. Tercapainya Pelunasan PBB dan PAD yang tepat waktu ;
 - b. Tercapainya pelaksanaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan APBD yang diberikan pada SKPD Kecamatan Sambeng.

Untuk mencapai tujuan "***Meningkatnya pelayanan masyarakat secara optimal***", ditetapkan ***sasaran*** sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan, dengan indicator:
 - a. Kepemilikan KTP.
 - b. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk.
 - c. Penerapan KTP Nasional (E-KTP) berbasis NIK.
 - d. Kepemilikan Kartu Keluarga.
- 2). Meningkatkan pelayanan pengajuan Perijinan, dengan indicator :
 - a. Kecepatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya Ijin Non Usaha.
 - b. Kecapatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya Ijin Usaha.
- 3). Meningkatkan Administrasi Pelayanan Dokumen Kependudukan;
 - a. Tercapainya tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Kependudukan.
 - b. Meningkatnya tertib Pelaporan Administrasi Kependudukan.

b. RENCANA KINERJA TAHUN 2011.

Merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja dimaksud ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Kerja Kecamatan Sambeng untuk mencapainya dalam tahun 2011. Agar lebih spesifik, dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran :
 - 1.1. Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah yang efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka perlu memberdayakan SDM yang ada dan mengoptimalkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, agar dapat dicapai pemantapan struktur dan Tata kerja Pemerintahan yang efektif dan efisien.

1.2. Membuat Standar Pelayanan Publik.

Dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat perlu adanya pembuatan Standar Pelayanan Publik sebagai acuan pelayanan Aparat sehingga akan tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal. Dengan harapan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.

1.3. Melakukan sosialisasi, dan mengikutsertakan pelatihan.

Memberikan bekal pengetahuan bagi Perangkat Desa maupun Staf Kecamatan Sambeng sehingga dalam pelayanan di Desa maupun di Kecamatan akan berjalan lancar. Salah satunya dengan melakukan Sosialisasi dan mengikutsertakan pelatihan akan menambah kompetensi SDM bagi para Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sambeng sehingga akan tercapainya pelayanan yang optimal.

2. Program.

2.1. Meningkatkan SDM Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sambeng ;

2.2. Melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya ;

2.3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala ;

2.4. Menegakkan Disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa ;

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

3.1. Meningkatkan SDM Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sambeng ;

Kebijakan yang diambil untuk pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah yang efektif dan efisien, adalah melakukan peningkatan SDM Perangkat Desa dan Staf Kecamatan. Dengan melakukan hal tersebut , maka tiap-tiap Perangkat Desa maupun Staf Kecamatan akan lebih tahu tentang Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

3.2. Melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. :

Pelayanan yang baik adalah salah satu hal terpenting dari sebuah Pemerintahan, dengan demikian perlu diadakannya sebuah Standar Pelayanan Publik sehingga dapat terwujud pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi masyarakat.

3.3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala.

Untuk dapat melayani masyarakat dengan optimal, maka perlu meningkatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala dengan melakukan Sosialisasi dan mengikutsertakan pelatihan bagi para Perangkat Desa dan Staf Kecamatan secara berkala, maka akan terjadinya peningkatan kemampuan dalam melayani masyarakat.

3.4. Menegakkan Disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa :

Dengan upaya menegakkan Disiplin masuk dinas, berpakaian dinas, pelayanan masyarakat dan tertib administrasi bagi Aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing serta pelayanan kepada masyarakat diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Desa semakin efektif, efisien dan Akuntabel serta pelayanan masyarakat dapat optimal.

c. PERJANJIAN KINERJA.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan Program sekaligus sebagai bentuk komitmen pimpinan SKPD Kecamatan Sambeng untuk menjalankan TUPOKSI sesuai ketentuan aturan penyelenggaraan Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan, Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, Pelaksanaan dilapangan dijabarkan dalam keputusan Camat Sambeng, Nomor : 188/24/Kep/413.317/2010, tanggal 15 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepala UPT Dinas/Instansi, dan Konferensi dinas Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dan Kepala Dusun se Kecamatan Sambeng Tahun 2011.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditindaklanjuti Peraturan Bupati Lamongan, Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya. Ditindaklanjuti Peraturan Bupati Lamongan, Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 28 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2011. Dan Peraturan Bupati Lamongan, Nomor : 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO) dan IMB.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan dilapangan ditindaklanjuti keputusan Camat Sambeng, Nomor : 188/22/Kep./413.317/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Perubahan terhadap keputusan Camat Sambeng, Nomor : 188/12/Kep/413.317/2009 tentang Standar Pelayanan Publik Kantor Camat Sambeng Kabupaten Lamongan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor : 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015.
8. Keputusan Bupati Lamongan, Nomor : 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pengukuran

Adalah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. **Pengukuran** dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam pengukuran Kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Wilayah Kecamatan Sambeng. Faktor internal antara lain meliputi Jumlah, SDM Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Sambeng, sarana dan prasarana kerja maupun dukungan dana. Sedangkan faktor eksternal antara lain meliputi Jumlah dan SDM unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, tuntutan masyarakat maupun era globalisasi.

b. Evaluasi Kinerja.

1. *Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.*

1.1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

1.1.1. Sasaran di 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Sambeng.

- a. Kegiatannya Pembinaan Organisasi Kepemudaan, dengan alokasi anggaran Rp. 3.600.000,- terserap Rp. 3.600.000,- atau 100 %.

2. *Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.*

2.1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan.

2.1.1. Sasaran di 22 (dua puluh dua) Desa di wilayah Kecamatan Sambeng.

- a. Kegiatannya pengendalian keamanan lingkungan, dengan alokasi anggaran Rp.19.800.000,- terserap Rp. 19.800.000,- atau 100 %.

3. *Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.*

3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adapun sasaran kegiatannya, yaitu :

- 3.1.1. Kegiatan pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Sambeng..
- 3.1.2. Kegiatan pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Sambeng..
- 3.1.3. Kegiatan pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.
- 3.1.4. Kegiatan administrasi Keuangan..
- 3.1.5. Kegiatan administrasi Perkantoran.

- 3.1.6. Kebutuhan barang cetak dan penggandaan di Kantor Kecamatan Sambeng.
- 3.1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik di Kecamatan.
- 3.1.8. Peningkatan SDM dan Wawasan Aparatur.
- 3.1.9. Kegiatan rapat-rapat dinas.
- 3.1.10. Jasa Tenaga administrasi teknis/kegiatan.

Sedang kegiatannya antara lain, yaitu :

- a. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik, alokasi anggaran Rp. 4.260.000,- terserap Rp. 3.384.970,- atau 79,46 % hal ini disebabkan karena beban biaya yang dibayar disesuaikan dengan tagihan rekening telepon.
- b. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, alokasi dananya sebesar Rp. 9.825.000,- terserap Rp. 9.825.000,- atau 100 %.
- c. Perijinan kendaraan dinas operasional dengan alokasi anggaran sebesar, Rp.1.000.000,- terserap Rp. 950.000,- atau 95 %
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, alokasi anggaran Rp. 9.600.000,- terserap Rp. 9.600.000,- atau 100 %.
- e. Penyediaan ATK, dengan alokasi anggaran Rp. 26.500.000,- terserap seluruhnya sebesar Rp. 26.500.000,- atau 100 %.
- f. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.006.000,- terserap Rp. 33.006.000,- atau 100 %.
- g. Penerangan bangunan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.390.000,- terserap Rp. 1.390.000,- atau 100 %.
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.2.276.000,- terserap Rp. 2.276.000,- atau 100 %.
- i. Buku Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp. 3.132.000,- terserap Rp.3.000.000,- atau 95,79 % yang disebabkan kenaikan harga buku peraturan perundang-undangan.
- j. Penyediaan makanan dan minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.420.000,- terserap Rp. 21.420.000,- atau 100 %.
- k. Penyediaan Jasa tenaga administrasi dan teknis, dengan alokasi anggaran Rp.24.400.000,- terserap Rp. 23.950.000,- atau 98,16 %.

3.2. Program penyediaan Sarana dan Prasarana, sasarannya yaitu :

3.2.1. Peralatan gedung Kantor.

3.2.2. Gedung Kantor.

3.2.3. Kendaraan dinas/operasional. Adapun kegiatannya yaitu :

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 18.200.000,- terserap Rp. 18.200.000,- atau 100 %.

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, alokasi anggaran Rp. 17.368.000,- terserap Rp. 17.367.000,- atau 100 %.

3.3. Program Peningkatan system pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, sasaran, antara lain :

3.3.1. Pelaksana/Pengguna Anggaran.

Dan kegiatannya yakni :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- terserap Rp. 4.846.000,- atau 96,92 %.

b. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terserap Rp. 4.846.000,- atau 96,92 %.

c. Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terserap Rp. 4.923.000,- atau 98,46 %.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4.1. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

4.1.1. Sasarannya adalah pelaksana/ pengguna Anggaran. Adapun kegiatannya yaitu :

a. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terserap Rp. 20.000.000,- atau 100 %.

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Program kegiatan yang tertuang dalam dokumen DPA , Renstra berikut penjabarannya di RKP tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi di SKPD Kecamatan Sambeng. (sebagaimana lampiran 2). Dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dimaksud didukung oleh :

a. Meningkatkan peranserta masyarakat selaku Subyek dan Obyek Pembangunan.

b. Tumbuh kembangnya semangat gotong-royong masyarakat sebagai kekuatan inti pemberdayaan masyarakat.

c. Meningkatkan profesionalisme kinerja Aparatur secara sistematis dan berkesinambungan.

d. Akuntabilitas Keuangan.

Dana rutin untuk operasional Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng selama Tahun Anggaran 2011 adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 281.345.000,- terserap Rp. 279.067.170,- atau 99,19 % . Penggunaan dana ini senantiasa sesuai dengan ketentuan yang ada baik mengenai pemanfaatannya, maupun pelaporannya. Hal ini kami maksudkan agar akuntabilitasnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ; Adapun rincian realisasinya, sebagai berikut :

Tabel. 3.3.
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

No.	SASARAN (Rp.)	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	DANA (%)
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan peran serta kepemudaan	3.600.000,00	3.600.000,00	100 %
2.	Pengendalian keamanan dan lingkungan	19.800.000,00	19.800.000,00	100 %
3.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	4.260.000,00	3.384.970,00	79,46 %
4.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	9.825.000,00	9.825.000,00	100 %
5.	Perijinan kendaraan dinas operasional	1.000.000,00	950.000,00	95 %
6.	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	100 %
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	26.500.000,00	26.500.000,00	100 %
8.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	33.006.000,00	33.006.000,00	100 %
9.	Penerangan bangunan Kantor.	1.390.000,00	1.390.000,00	100 %
10.	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor.	2.276.000,00	2.276.000,00	100 %
11.	Buku Perundang-undangan	3.132.000,00	3.000.000,00	95,79 %

Lanjutan

12.	Penyediaan makanan dan minuman	21.420.000,00	21.420.000,00	100 %
13.	Penyediaan Jasa Tenaga/ teknis	24.400.000,00	23.950.000,00	98,16 %
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor.	18.200.000,00	18.200.000,00	100 %
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas	17.368.000,00	17.367.600,00	100 %
16.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	4.846.000,00	96,92 %
17.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,00	4.846.000,00	96,92 %
18.	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	4.923.000,00	98,46 %
19.	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sambeng dibuat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999, yang mengamatakan setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan terciptanya good governance, diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun Anggaran 2011 Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng telah melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuaskan semua pihak. Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2011, akan kami jadikan motivasi untuk berbuat lebih baik dalam Tahun Anggaran 2012, sehingga tujuan terciptanya good governance dan pelayanan masyarakat secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud.

Sambeng, 25 Januari 2012
CAMAT SAMBENG
SUDJITO, SE
Pembina
NIP. 196001191993031001



RENCANA STRATEJIK

Tahun 2011

FORMULIR RS

Instansi : Kecamatan Sambeng

Visi : Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta Pelayanan Masyarakat yang Optimal ".

Misi : a. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel serta terselenggaranya Good Gavernance ;
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal ;

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta terselenggaranya Good Gavernance	1. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan. 2. Meningkatnya penanganan pertanahan. 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan 4. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara baik. 5. Meningkatnya Waskat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan. 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.	a. Tersedianya Dokumen perencanaan, RENSTRA yang telah ditetapkan; b. Penjabaran Program RENSTRA ke dalam RKP ; c. Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu; d. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan. a. Luas lahan bersertipikat. b. Penyelesaian kasus Tanah Negara ; a. Sistim Informasi Manajemen SKPD Kecamatan; b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat a. Dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib. b. Tercapainya tertib pelaporan administrasi kepegawaian ; a. Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa. b. Evaluasi tindaklanjut pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kasubag. c. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu ; a. Tercapainya pelunasan PBB dan PAD yang tepat waktu. b. Tercapainya pelaksanaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan APBD yang diberikan pada SKPD Kec. Sambeng.	1. Meningkatkan SDM Kades, Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sambeng. 2. Melakukan Pelayanan dengan sebaik-baiknya. 3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala. 4. Menegakkan Disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa.	1. Peningkatan kualitas administrasi umum Kecamatan ; 2. Peningkatan administrasi system kependudukan dan pelayanan akte Catatan Sipil maupun kuantitas dan kualitas pembinaan kepada unsur Pemerintahan Desa; 3. Penegakkan disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 4. Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban Kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	Penyusunan LAKIP Kecamatan Sambeng Tahun 2011 mengacu pada RENSTRA Kecamatan Sambeng Tahun 2010-2015, dan sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1	2	3	4	5	6
2. Meningkatnya pelayanan masyarakat secara optimal.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.. 2. Meningkatnya pelayanan pengajuan perijinan. 3. Meningkatnya Adninistrasi pelayanan dokumen kependudukan.	a. Kepemilikan KTP; b. Kepemilikan akte Kelahiran per 1000 penduduk c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ; d. Kepemilikan Kartu Keluarga.. a. Kecepatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya ijin Non usaha. b. Kecepatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya Ijin Usaha. a. Tercapainya Tertib Administrasi dan pengelolaan arsip kependudukan. b. Meningkatnya tertib Pelaporan Administrasi Kependudukan.			

Sambeng, 25 Januari 2012


 CAMAT SAMBENG

SUDJITO, SE
 Pembina
 Nip. 196001191993031001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2011

Instansi : kecamatan Sambeng

FORMULIR RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan.	a. Tersedianya dokumen perencanaan RENSTRA yang telah ditetapkan ;	1 dokumen	1.Meningkatkan SDM Kades dan Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Sambeng ;	1.Peningkatan kualitas Administrasi umum Kecamatan ;	Input : Dana : SDM : Out Put : a. Penyelesaian dokumen RENSTRA dan RKP b. Jumlah Laporan kepegawaian ; c. Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran hukum; d. Proses gaji berkala	Rupiah Orang surat Kali Jenis Orang	10.000.000,- 2 1 12 4 3 40.000.000,-	
2.Meningkatnya penanganan pertanian.	a. Luas lahan bersertipikat ; b. Penyelesaian kasus tanah negara ;	12 kali 2 orang	2.Melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya;	2.Peningkatan adm. System Kependudukan dan pelayanan akte Catalan Sipil maupun kuantitas dan kualitas pembinaan kepada unsur Pemerintah Desa;	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi UPT Dinas /Instansi dan konferensi Kades & Perangkat Desa se Kec. 2. Evaluasi pelaksanaan Tupoksi para Kasi, Kasubag., Kades dan Perangkat Desa se Kec.Sambeng 3. Fasilitas Penertiban administrasi pertanian; 4. Fasilitas penerimaan TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta Tunjangan BPD .	Rupiah Orang Kali Kali Buku Rupiah Rupiah Orang	3 12 12 44 1.081.400.000,- 76.000.000,- 30.000.000,- 2 6	
3.Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan.	a. Sistem Informasi Manajemen SKPD Kecamatan; b. Indeks Kepuasan layanan masyarakat;	12 kali 3 orang	3.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala.	3.Penegakkan disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat ;.	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Musrenbang Evaluasi 2. Jumlah laporan kegiatan Pembangunan ; 3. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual	Kali Kali Kali Rupiah Kali	12 12 12 PM	
4.Meningkatnya pengelolaan Administrasi Kepegawaian.	a. Dokumen pengelolaan administrasi Kepegawaian secara tertib ; b. Tercapaian tertib pelaporan administrasi Kepegawaian ;	12 kali 16 orang						
5. Meningkatnya Waskat dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.	a. Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Pemerintah Kecamatan Dan Desa b. Evaluasi tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi dan Kasubag. c. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu.	semua warga masyKec. Sambeng Semua Aparatur Kec & Desa						
6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.	a. Tercapainya pelunasan PBB dan PAD yang tepat waktu. b. Tercapainya pelaksanaan kewenangan terhadap pengelolaan APBD yang diberikan SKPD Kec. Sambeng.	12 kali PBB lunas sebelum jatuh tempo						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan..	a. Kepemilikan KTP ; b. Kepemilikan akte Kelahiran per 1000 penduduk; c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK d. Kepemilikan Kartu Keluarga.	Semua KK miskin S d a Masy peneri ma SP- NIK	4.Menegakkan disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa.	4.Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN , pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan bea siswa warga miskin.	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Fasilitasi distribusi RASKIN 2. Pelaporan penerimaan RASKIN 3. Pemberian bea siswa	Rupiah Orang	20.000.000. 2	12 bulan
8.Meningkatnya pelayanan pengajuan perijinan.	a. Kecepatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya Ijin Non Usaha. b. Kecepatan waktu pengajuan berkas sampai dengan diterbitkannya Ijin Usaha.	12 kali 12 kali		5.Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah.	4. Fasilitasi pelayanan Jamkesmas & Jamkesda. Input : Dana : SDM : Out Put 1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke Desa ; 2. Frekuensi inspeksi kepemilikan Ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng ; 3. Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah 4. Pemantauan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Kg Kali Penerima	52965/bulan 12 7	
9.Meningkatnya administrasi pelayanan dokumen kependudukan.	a. Tercapainya tertib administrasi dan pengelolaan arsip Kependudukan ; b. Meningkatnya tertib pelaporan administrasi kependudukan;	12 kali Setiap saat Semua Aparatur Kec. & desa		Rupiah Orang	20.000.000. 4			
				Kali	24			
						Kali	44	
						Rupiah	497.090.527,- & 840.000,-	
						Kali	Setiap ada pengiriman	

Sambeng, 25 Januari 2012

CAMAT SAMBENG


SUDIARTO, SE
Pembina
Nip.196001191993031001

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Tahun 2011

Instansi : Kecamatan Sambeng

Formulir PPS

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Sambeng ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pemrosesan kenaikan gaji berkala.	528 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	528 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	100 % 100 % 100 % 100 %	
2. Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan ;	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ; d. Terselurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa dan Anggota BPD	12 kali 12 kali 12 kali semua kades & PD serta BPD	12 kali 12 kali 12 kali semua	100 % 100 % 100 % 100 %	
3. Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat;	a. Jumlah rapat Koordinasi dengan Kacabdin/UPT dan Kades, BPD Tokoh Masyarakat ; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ; d. Terbangunnya sarana & prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop dan APBD Kab.	3 kali 6 kali 12 kali semua desa	3 kali 6 kali 12 kali PM	100 % 100 % 100 % PM	
4. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;	a. Terselurnya distribusi RASKIN, Kartu JAMKESMAS	KK miskin	kk miskin	100 %	
5. Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban.	b. Penerima Bea siswa a. Terselenggaranya jaga pos kamling di semua desa sampai tingkat RT ; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi kecamatan ; c. Monitoring situasi & kondisi ketentraman & ketertiban di semua desa ; d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan pajak dan retribusi daerah .	18 orang 12 kali 12 kali 12 kali PBB lunas sbl jatuh tempo	kk Penerima 12 kali 12 kali 12 kali PBB lunas	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Sambeng, 25 Januari 2012





**PENETAPAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2011

Lamongan, Januari 2011

Menyetujui
BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.

KAMAT SAMBENG
KECAMATAN
SAMBENG

SUDJITO, SE.
Pembina
NIP. 19600119 199303 1 001

**LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUT PUT		INDIKATOR KINERJA OUT COME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Peningkatan peran serta Kepemudaan	Pemuda di 22 Desa.	Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Sambeng.	90 %	Meningkatnya peran serta Kepemudaan di Kec. Sambeng.	90 %	Rp. 3.600.000,-
2.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. 1. Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan.	22 Desa di Wilayah Kecamatan Sambeng.	Terlaksananya pengendalian keamanan dan lingkungan.	85 %	Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	85 %	Rp. 19.800.000,-
3.	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.						
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik.	100%	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik tepat waktu.	100%	Rp. 4.100.000,-
	2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.	Adanya peralatan dan perlengkapan Kantor serta jasa servis yang dibutuhkan.	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang dapat beroperasi dengan baik.	100 %	Rp. 21.600.000,-
	3. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Sambeng.	Terbitnya STNK Kendaraan Dinas Roda 4.	100 %	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.	100 %	Rp. 500.000,-
	4. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Buku Cek Bank	100 %	Tercapainya kualitas pelayanan administrasi Keuangan.	100 %	Rp. 1.500.000,-
	5. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Administrasi Perkantoran.	Penyediaan ATK.	100 %	Terpenuhinya ATK.	100 %	Rp. 26.500.000,-
	6. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan di Kantor Kec.	Barang Cetakan dan penggandaan kebutuhan Kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang Cetakan dan penggandaan di Kantor.	100 %	Rp. 33.006.000,-
	7. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Penyediaan komponen instalasi Listrik di Kecamatan.	Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor.	100 %	Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor.	100 %	Rp. 1.390.000,-
	8. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Peningkatan SDM dan Wawasan Aparatur.	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	100 %	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.	100 %	Rp. 3. 132.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Rapat-rapat dinas.	Makanan dan Minuman rapat.	100 %	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat.	100 %	Rp. 21.420.000,-
	10. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa tenaga Administrasi teknis/kegiatan.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis kegiatan	100 %	Meningkatnya pelayanan Jasa Administrasi Teknis/ Kegiatan.	100 %	Rp. 11.040.000,-
	11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Peralatan Gedung Kantor.	Komputer dan Printer.	100 %	Terlaksananya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran.	100 %	Rp. 16.000.000,-
	12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	100 %	Terjaganya kualitas bangunan Kantor..	100 %	Rp. 13.200.000,-
	13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kendaraan dinas/ operasional.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional.	100 %	Terjaganya kondisi yang Laik jalan untuk kendaraan dinas/operasional.	100 %	Rp. 14.400.000,-
	14. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor.	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.	100 %	Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	100 %	Rp. 5.000.000,-
	15. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor	Laporan Keuangan Semesteran.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
	16. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Laporan Keuangan Akhir Tahun.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100 %	Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100 %	Rp. 20.000.000,-

